

Dinsos Bombana Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Rumah di Desa Timbala

Bombana, sultranet.com - Dinas Sosial Kabupaten Bombana menyalurkan bantuan sosial kepada Suriani (35), warga Desa Timbala, Kecamatan Poleang Barat, yang menjadi korban kebakaran rumah. Bantuan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan rumah tangga diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar korban setelah kehilangan tempat tinggal dan sejumlah barang miliknya akibat kebakaran, beberapa waktu lalu.

Bantuan tersebut merupakan bentuk respons Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Sosial terhadap warga yang mengalami musibah. Penyaluran dilakukan setelah pemerintah menerima informasi mengenai kondisi korban dan dampak kebakaran yang menghancurkan rumah beserta sebagian besar perabot di dalamnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Sadli Sirajuddin, mengatakan bantuan diberikan untuk meringankan beban korban, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pemulihan.

“Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan respons pemerintah daerah melalui Dinas Sosial kepada masyarakat yang terdampak musibah. Kami berharap bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan kebutuhan korban, khususnya kebutuhan pokok dan perlengkapan rumah tangga setelah rumahnya mengalami kebakaran,” ujar Sadli.

Bantuan yang disalurkan mencakup berbagai kebutuhan dasar rumah tangga. Di antaranya makanan siap saji dan perlengkapan yang dibutuhkan korban untuk menjalani aktivitas sehari-hari setelah kehilangan tempat tinggal.

Kebakaran yang menimpa rumah Suriani terjadi pada Jumat, 18 September 2026, sekitar pukul 08.00 WITA. Peristiwa tersebut menghancurkan satu unit rumah warga di Desa Timbala, Kecamatan Poleang Barat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kebakaran diduga bermula dari aktivitas

memasak dan membakar ikan menggunakan tungku berbahan bakar kayu di sekitar rumah. Setelah selesai memasak, korban sempat menyiram api sebelum meninggalkan rumah untuk bekerja.

Namun, beberapa waktu setelah korban meninggalkan rumah, bangunan tersebut diketahui telah terbakar. Api kemudian membesar dan dengan cepat melahap bagian rumah beserta perabot dan peralatan rumah tangga yang berada di dalamnya.

Kebakaran tersebut menyebabkan hampir seluruh bagian rumah terdampak. Sejumlah barang milik korban ikut terbakar sehingga korban tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga berbagai perlengkapan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Meski demikian, kebakaran menimbulkan kerugian materi yang diperkirakan mencapai sekitar Rp40 juta.

Kerugian tersebut mencakup bangunan rumah, perabot, peralatan rumah tangga, serta barang-barang lain yang berada di dalam rumah saat kebakaran terjadi. Kondisi itu membuat korban membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar setelah musibah.

Penyaluran bantuan menjadi salah satu bentuk intervensi sosial pemerintah daerah bagi masyarakat yang mengalami kondisi darurat akibat bencana atau musibah. Bantuan diberikan sesuai kebutuhan dan kemampuan pemerintah daerah.

Sadli mengatakan pemerintah melalui Dinas Sosial akan terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait untuk memastikan masyarakat yang terdampak musibah mendapatkan penanganan sosial yang diperlukan.

“Dinas Sosial terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait untuk memastikan masyarakat yang mengalami musibah dan membutuhkan penanganan sosial dapat memperoleh bantuan sesuai dengan ketentuan dan kemampuan pemerintah daerah,” katanya.

Menurut Sadli, bantuan pada masa awal setelah kejadian penting untuk membantu korban memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi korban yang kehilangan tempat tinggal membuat kebutuhan terhadap makanan, perlengkapan

rumah tangga, dan kebutuhan dasar lainnya menjadi lebih mendesak.

Karena itu, pemerintah daerah berupaya memberikan bantuan sesuai kondisi masyarakat yang terdampak. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memastikan warga yang mengalami musibah tidak menghadapi masa pemulihan seorang diri.

Selain memberikan bantuan, Dinas Sosial juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai sumber api di lingkungan rumah. Penggunaan tungku berbahan bakar kayu membutuhkan perhatian khusus, terutama setelah aktivitas memasak selesai.

Sadli meminta masyarakat memastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan rumah. Pemeriksaan sederhana terhadap tungku dan sumber api dapat membantu mengurangi risiko kebakaran.

“Kami mengingatkan masyarakat untuk selalu berhati-hati terhadap berbagai sumber api di lingkungan rumah. Pastikan api benar-benar padam setelah memasak, terutama jika menggunakan tungku atau bahan bakar kayu,” ujarnya.

Menurutnya, pencegahan menjadi langkah penting karena kebakaran rumah dapat menimbulkan kerugian besar bagi keluarga. Selain kerusakan bangunan, korban dapat kehilangan dokumen, peralatan rumah tangga, pakaian, makanan, dan barang berharga lainnya dalam waktu singkat.

Peristiwa di Desa Timbala juga menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tidak meninggalkan sumber api tanpa memastikan kondisinya aman. Penggunaan tungku kayu, kompor, lilin, maupun sumber api lainnya perlu dilakukan dengan pengawasan.

Dinas Sosial Kabupaten Bombana akan tetap berkoordinasi dengan pemerintah desa dalam menangani masyarakat yang terdampak musibah. Koordinasi diperlukan agar informasi mengenai kondisi korban dapat diterima secara cepat dan bantuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam menyampaikan laporan mengenai warga yang membutuhkan penanganan sosial. Dengan koordinasi yang baik, bantuan dapat diarahkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Bagi Suriani, bantuan yang diterima diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar setelah rumahnya terbakar. Dukungan tersebut menjadi bagian dari proses pemulihan agar korban dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari secara bertahap.

Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Sosial juga terus mendorong masyarakat untuk saling membantu ketika terjadi musibah. Kepedulian dari pemerintah dan lingkungan sekitar dapat membantu mengurangi beban warga yang sedang menghadapi kondisi sulit.

Penyaluran bantuan kepada korban kebakaran di Desa Timbala menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan sosial ketika menghadapi musibah. Bantuan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi juga menjadi bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

Dengan dukungan tersebut, korban diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok selama masa pemulihan. Pada saat yang sama, kewaspadaan masyarakat terhadap potensi kebakaran perlu terus ditingkatkan untuk mencegah kejadian serupa.

Tag:

Frasa kunci:

Topik:

Deskripsi meta:

Dinsos Bombana Salurkan Buku KKS kepada KPM Baru Penerima

PKH 2026

Bombana, sulltranet.com - Dinas Sosial Kabupaten Bombana bersama Bank Mandiri dan pendamping sosial menyalurkan Buku Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada keluarga penerima manfaat (KPM) baru Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2026. Penyaluran tersebut menjadi bagian dari proses administrasi untuk memastikan keluarga yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan dapat mengakses bantuan sosial melalui mekanisme perbankan, dan berlangsung di Aula Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Rabu (17/9/2026).

Penerima dalam kegiatan tersebut merupakan KPM baru yang sebelumnya belum tercatat sebagai penerima bantuan sosial PKH. Mereka telah melalui proses verifikasi dan ditetapkan sebagai penerima manfaat pada Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan program pemerintah.

Penyaluran Buku KKS dilakukan secara simbolis kepada perwakilan KPM baru. Buku tersebut menjadi bagian dari sarana rekening penerima manfaat untuk mengakses bantuan sosial yang disalurkan melalui lembaga perbankan.

Kegiatan ini melibatkan tiga unsur utama, yakni Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Bank Mandiri sebagai bank penyalur, serta pendamping sosial PKH. Ketiganya menjalankan peran masing-masing untuk memastikan proses penyaluran administrasi kepada penerima baru berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Sadli Sirajuddin, mengatakan penyaluran Buku KKS merupakan salah satu tahapan penting bagi keluarga yang baru ditetapkan sebagai penerima PKH. Dengan adanya KKS, penerima dapat memiliki akses terhadap bantuan sosial sesuai dengan ketentuan program.

“Sasaran kegiatan ini adalah keluarga penerima manfaat baru yang pada Tahun 2026 telah ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial. Kami berharap para KPM dapat menjaga Buku KKS dengan baik dan mengikuti pendampingan serta informasi yang diberikan terkait mekanisme program,” ujar Sadli.

Menurut Sadli, penerima baru perlu memahami fungsi KKS dan mekanisme penggunaan bantuan sejak awal. Pemahaman tersebut penting agar KPM dapat menggunakan fasilitas yang diberikan sesuai dengan ketentuan program dan

menghindari kesalahan dalam proses penerimaan bantuan.

Pendamping sosial PKH turut memberikan penjelasan kepada KPM mengenai penggunaan KKS, mekanisme penerimaan bantuan, serta hak dan kewajiban penerima manfaat. Pendampingan dilakukan agar keluarga penerima tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memahami proses dan aturan yang menyertai program.

KKS menjadi salah satu sarana yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial melalui sistem perbankan. Karena itu, penerima manfaat perlu menjaga dokumen dan fasilitas yang diberikan agar dapat digunakan ketika bantuan disalurkan.

Bagi KPM baru, penerimaan Buku KKS menandai tahap lanjutan setelah proses penetapan sebagai penerima PKH. Sebelumnya, keluarga calon penerima harus melalui proses verifikasi berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum ditetapkan sebagai penerima manfaat.

Proses tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan bantuan sosial diberikan kepada keluarga yang telah memenuhi kriteria program. Setelah penetapan dilakukan, penerima kemudian diarahkan untuk menyelesaikan tahapan administrasi yang diperlukan agar dapat menerima bantuan.

Dinas Sosial Kabupaten Bombana berkoordinasi dengan Bank Mandiri dalam proses penyaluran tersebut. Koordinasi diperlukan untuk memastikan fasilitas perbankan bagi penerima baru dapat diproses dan digunakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pendamping sosial juga memiliki peran penting dalam memastikan KPM memahami informasi yang disampaikan. Pendamping menjadi salah satu pihak yang berinteraksi langsung dengan penerima manfaat dan membantu menjelaskan berbagai ketentuan program.

Sadli mengatakan pendampingan tidak berhenti setelah Buku KKS diterima. Dinas Sosial bersama pendamping sosial akan terus memberikan informasi kepada KPM mengenai mekanisme bantuan serta kewajiban yang harus dipenuhi selama menjadi penerima PKH.

“Dinas Sosial bersama pendamping sosial akan terus melakukan pendampingan kepada KPM. Kami akan memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan

bantuan dan kewajiban penerima manfaat sesuai dengan ketentuan PKH,” kata Sadli.

Pendampingan tersebut menjadi penting karena setiap penerima manfaat memiliki tanggung jawab untuk mengikuti ketentuan program. KPM juga perlu memperhatikan informasi yang diberikan oleh pendamping maupun pihak terkait agar tidak mengalami kendala dalam proses penerimaan bantuan.

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu bentuk bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada keluarga penerima manfaat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Penyaluran bantuan dilakukan melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah dan melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaannya.

Di tingkat daerah, Dinas Sosial memiliki peran dalam mendukung proses administrasi, pendampingan, serta koordinasi dengan pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan. Peran tersebut diperlukan agar program dapat berjalan sesuai ketentuan dan masyarakat memperoleh informasi yang jelas.

Penyaluran Buku KKS kepada KPM baru Tahun 2026 juga menjadi bagian dari upaya memperlancar proses administrasi penerima bantuan sosial di Kabupaten Bombana. Pemerintah daerah berharap keluarga yang telah ditetapkan dapat segera memperoleh akses terhadap bantuan melalui mekanisme yang tersedia.

Bagi penerima, KKS bukan hanya dokumen administrasi. KKS menjadi sarana yang berkaitan dengan akses terhadap bantuan sosial. Karena itu, penerima perlu menyimpan dan menjaganya dengan baik serta mengikuti arahan yang diberikan oleh pihak terkait.

Dinas Sosial juga mengingatkan agar KPM memahami prosedur dan informasi yang diberikan selama proses penyaluran. Jika terdapat kendala atau perubahan informasi, penerima dapat berkoordinasi dengan pendamping sosial maupun pihak terkait sesuai jalur pelayanan yang tersedia.

Koordinasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pendamping sosial menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran program. Masing-masing pihak memiliki fungsi yang saling melengkapi, mulai dari proses administrasi hingga pemberian informasi kepada penerima manfaat.

Bank Mandiri dalam kegiatan tersebut berperan sebagai bank penyalur yang

mendukung proses penyediaan akses perbankan bagi KPM. Sementara pendamping sosial membantu penerima memahami tata cara dan ketentuan yang berkaitan dengan program PKH.

Dinas Sosial Kabupaten Bombana memastikan proses penyaluran dilakukan kepada keluarga yang telah ditetapkan sebagai penerima baru. Proses tersebut mengikuti tahapan administrasi yang berlaku dalam program bantuan sosial.

Penetapan penerima baru juga menunjukkan bahwa data penerima bantuan sosial terus diperbarui melalui proses verifikasi. Pembaruan data diperlukan agar bantuan dapat disalurkan sesuai sasaran dan menjangkau keluarga yang memenuhi ketentuan.

Namun, setelah ditetapkan sebagai penerima, KPM tetap perlu mengikuti proses pendampingan. Pendampingan menjadi bagian penting untuk memastikan penerima memahami tujuan program dan dapat mengikuti ketentuan yang berlaku.

Sadli berharap para penerima baru dapat menggunakan bantuan secara tepat sesuai kebutuhan dan tujuan program. Ia juga meminta KPM memperhatikan informasi yang diberikan pendamping agar proses penerimaan bantuan berjalan lancar.

“Kami berharap para KPM mengikuti pendampingan dengan baik. Informasi dari pendamping penting untuk dipahami agar penerima mengetahui hak dan kewajibannya selama mengikuti program PKH,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga berharap proses administrasi bagi penerima baru dapat berjalan tanpa kendala. Kelancaran administrasi menjadi salah satu faktor yang mendukung akses penerima terhadap bantuan sosial yang telah ditetapkan.

Penyaluran Buku KKS tersebut menjadi bagian dari rangkaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat penerima bantuan sosial. Kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada penyerahan dokumen, tetapi juga memberikan informasi kepada penerima agar memahami tahapan yang harus dilalui.

Bagi keluarga yang baru masuk sebagai penerima PKH Tahun 2026, pendampingan menjadi tahap penting setelah penetapan. Penerima diharapkan aktif mengikuti informasi dan arahan yang disampaikan agar dapat menjalankan

kewajiban sesuai ketentuan program.

Melalui koordinasi antara Dinas Sosial, Bank Mandiri, dan pendamping sosial, Pemerintah Kabupaten Bombana berupaya memastikan proses administrasi penerima bantuan berjalan tertib. Langkah tersebut diharapkan dapat memperlancar akses KPM baru terhadap bantuan sosial.

Pemerintah daerah juga menempatkan pendampingan sebagai bagian dari upaya memastikan program tidak hanya tersalurkan secara administratif, tetapi dipahami oleh penerima. Informasi yang jelas dapat membantu KPM menggunakan fasilitas bantuan sesuai dengan ketentuan.

Penyaluran Buku KKS kepada KPM baru PKH Tahun 2026 akhirnya menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Bombana. Setelah menerima KKS, penerima diharapkan menjaga dokumen tersebut, mengikuti pendampingan, dan memahami seluruh ketentuan program.

Dengan proses administrasi yang berjalan baik dan pendampingan yang berkelanjutan, pemerintah daerah berharap KPM yang telah ditetapkan dapat memperoleh akses bantuan sesuai mekanisme yang berlaku. Program tersebut diharapkan dapat terus dilaksanakan secara tertib, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi keluarga penerima di Kabupaten Bombana.